



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Oktober 2021

Halaman: 5

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 561270  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media Massa : **Tribun** Hari : **Jumat** Tanggal : **29/10/21** Halaman : **5**

## Pedagang Diminta Jangan “Aji Mumpung”

### Wali Kota Ingatkan Pelaku Usaha Malioboro Tidak Nuthuk Wisatawan

**YOGYA, TRIBUN** - Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta semakin menunjukkan geliatnya, seiring turunnya tingkat PPM ke level dua beberapa waktu lalu. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, meminta supaya pedagang tidak “aji mumpung” dengan kondisi tersebut.

Haryadi meminta agar pedagang bisa menyikapi secara bijak kondisi tersebut. Dalam artian, para pelaku ekonomi tak lantas memanfaatkan situasi secara berlebihan. Meski ia dapat memahami, kondisi ini sudah lama dinanti-nanti.

“Kaitannya dengan tarif atau harga di seputar Malioboro. Jangan ada yang aji mumpung, parkirnya berapa, rondennya dijual berapa,” tegas Haryadi, Kamis (28/10).

Dirinya mengungkapkan, jangan sampai insiden “nuthuk” yang sempat viral tempo hari, terjadi kembali di kawasan Malioboro. Menurutnya, hal hal semacam itu jelas sangat mencoreng nama baik Yogyakarta, yang membawa predikat daerah pariwisata unggulan di Indonesia.

Oleh sebab itu, orang nomor satu di kota pelajar tersebut mendorong adanya penyeragaman harga, untuk souvenir, maupun cinderamata, yang dijual di kawasan Malioboro. Sehingga, bisa muncul bandarol baku, layaknya penjaja kuliner, yang diwajibkan menca-

tumkan harga.

“Yang jualan kaos, souvenir, dan segala macam itu, mbok ditarif, beri ora sah nung-nungan (harus tidak perlu tawar-menawar), kan nggak enak itu,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya melakukan sinkronisasi antara aplikasi yang kini digarapnya, “Sugeng Rawuh” dengan PeduliLindungi untuk menskrining wisatawan yang masuk kawasan Malioboro.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto, mengatakan, langkah sinkronisasi tersebut, ditempuh guna mempermudah pengunjung. Sehingga, begitu di Malioboro mereka pun tak perlu scan QR Code berulang-ulang kali.

Ia menandakan, pihaknya merasa perlu mengembangkan aplikasi sendiri, untuk memantau pembatasan maksimal waktu kunjungan dua jam. Sebab, jika hanya mengandalkan PeduliLindungi, pihaknya tidak sanggup memantaunya.

Tapi, itu masih merung-

gu sinkronisasinya dulu ya, dengan PeduliLindungi. Kami berharap, tidak banyak aplikasi yang digunakan pengunjung. Simple saja, cukup sekali (scan), namun dua-duanya kena,” katanya.

Menurut Ekwanto, aplikasi “Sugeng Rawuh” secara otomatis juga bakal menyajikan data pengunjung Malioboro secara real time. Sehingga, pihaknya dapat mengambil tindakan, seandainya jumlah wisatawan telah melebihi kapasitas.

“Ya, tujuannya kan itu juga. Tapi, kami harus menghindari keluhan masyarakat, jangan sampai memberikan, masuk Malioboro harus pasang banyak aplikasi, ribet. Makanya, di sinkronkan itu, dengan PeduliLindungi,” ungkapnya.

Walau begitu, ia tidak menampik, meski sudah ada aplikasi sekalipun, proses skrining pengunjung Malioboro jelas tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, terdapat begitu banyak pintu masuk yang bisa diakses penuh.

Tapi, itu masih merung-

nya nggak bayar, tidak ada karcis, kemudian pintunya banyak. Paling tidak kita membutuhkan 17 gate untuk pintu masuk dan keluar,” katanya.

**Pertumbuhan ekonomi**  
Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, mengatakan, sektor pariwisata menjadi yang paling parah terkena dampaknya dari pandemi Covid-19. Meski demikian, Danang menyebut di sektor pertanian justru menunjukkan tren positif terkait pertumbuhan ekonominya.

Danang meminta para eksekutif mengubah orientasi pendapatan sektor pariwisata bukan pada seberapa banyak wisatawan yang hadir, melainkan seberapa banyak wisatawan itu mengeluarkan belanja. “Ada masalah kompleks, bahwa kami berharap wisatawan bisa menjadi daya ungkit, tetapi tidak berdasarkan pada berapa kunjungan wisatanya, melainkan berapa banyak belanja yang dikeluarkan,” jelasnya.

Sebagai contoh, Danang menyebut wisatawan di Gunung Merapi Purbo, Nglanggeran, Wonorejo, Kabupaten Gunungkidul saat ini menurun. Namun pendapatan pihak pengelola serta pemerintah daerah justru mengalami kenaikan.

“Ini perlu disosialisasikan, bagaimana jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan naik,” pungkasnya. (bda)

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata                      | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya |              |       |                 |

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005